

Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan Heuristik Yang Representatif

Ai Wildani Sri Aidah, M.MPd.

**Jurusan Ilmu Hukum FISIP Universitas Terbuka
Komisioner KPU Kab.Bandung Barat Prov.Jawa Barat
aidah230570@gmail.com**

Abstrak

Manajemen diperlukan sebagai kesatuan sistem partisipasi yang efektif dalam pembuatan keputusan strategik yang representatif, serta berfungsi sebagai refleksi dari pola pikir heuristik. Herbert Mc.Closky dalam Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 1994: 183-184). Konsep partisipasi politik menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi permusyawaratan yang negeri kita anut. Pemikiran ini merupakan reaksi dari adanya tingkat apatisisme politik di Barat yaitu sekitar 50-60% partisipasi pemilih dalam pemilu. Di Indonesia partisipasi politik diartikan sebagai dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang dibuat para pemimpin politik, sehingga pemerintahan dapat dilihat dari spektrum : otoriter, patriamonal, partisipatif, ataukah demokratis. Di antara tujuh parameter evaluasi pemilu 2014 yang dilakukan ERI (Electoral Research Institute) tentang electoral law terdapat aksentuasi evaluasi terhadap parameter black-campaign dan media-campaign sebagai bentuk partisipasi publik. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu atau pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu akan dianggap semakin tinggi. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008 : 367). Menurut teori pertukaran (Peter Blau dalam Judistira Garna, 2001 : 27) bagi negara yang sebagian besar rakyatnya miskin, politik uang adalah teknik rekrutmen massa yang sangat efektif. Sistem proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti

terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan itu selalu menunjukkan siklus, baik implisit maupun eksplisit, berupa rangkaian input, persepsi, intuisi dan refleksi yang tepat atas suatu persoalan. Sedangkan heuristik adalah suatu keputusan yang ditetapkan karena adanya berbagai aturan praktis yang harus dipilih menjadi aturan praktis terbaik berdasarkan pertimbangan intuitif dan akal sehat. Keputusan heuristik itu diklasifikasikan menjadi keputusan heuristik yang representatif, heuristik ketersediaan, dan heuristik jangkang (Daniel Kahneman, 2011).

Kata kunci: partisipasi politik, pengambilan keputusan, heuristik, representatif

PENDAHULUAN

Partisipasi Politik Menurut Para Ahli

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Ini meliputi keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk ikut juga dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Herbert Mc.Closky dalam Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiardjo, 1994: 183-184).

Michael Rush dan Philip Althoff memaparkan sosialisasi politik sebagai proses mempengaruhi individu sehingga dapat mengenali sistem politik yang akan menentukan persepsi dan reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang terjadi dalam pengalaman hidupnya. Fungsi sosialisasi adalah untuk melatih individu dan memelihara sistem politik. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Pelatihan ini memungkinkan individu menerima atau menolak tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilu.

Untuk mencapai fungsi sosialisasi politik di atas, Rush dan Althoff menemukan metode-metode sosialisasi untuk penanaman etika budaya politik, yaitu : 1) Imitasi (meniru tingkah laku orang lain yang dijadikan *rule-model*) , 2) Instruksi (memberitahu individu tentang posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus dilakukannya, bagaimana melakukannya dan untuk apa mereka melakukannya) , 3) Motivasi (dengan memberi stimulus kepada individu untuk langsung belajar dari pengalaman politiknya, serta membandingkan pendapat dan tingkah laku dirinya sendiri dengan orang lain).

Konsep partisipasi politik menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi permusyawaratan yang negeri kita anut. Pemikiran ini merupakan reaksi dari adanya tingkat apatisme politik di Barat (hanya 50-60 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu tlibat dalam proses perwakilan ini sangat mengkhawatirkan para pemikir Barat sehingga muncullah konsep deliberative democracy.

Dengan melihat derajat partisipasi politik warga maka dapat dilihat beberapa spektrum pemerintahan berikut ini :

1. Rezim otoriter, yaitu warga tidak tahu menahu tentang kebijakan dan keputusan politik
2. Rezim patrimonial, yaitu warga diberitahu tentang keputusan yang telah dibuat pemerintah tetapi tidak dapat mempengaruhinya
3. Rezim partisipatif, yaitu warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya
4. Rezim demokratis, yaitu warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Di antara tujuh parameter evaluasi pemilu 2014 yang dilakukan ERI (*Electoral Research Institute*) tentang *electoral law* terdapat aksentuasi evaluasi terhadap parameter *black-campaign* dan *media-campaign* sebagai bentuk partisipasi publik. Partisipasi politik adalah faktor penentu keberhasilan pemilu atau pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu akan dianggap semakin tinggi. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008: 367). Ada beberapa rambu-rambu partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (opcit, 2008 : 141) :

1. Partisipasi merupakan kegiatan atau perilaku luar warga negara yang biasa dapat diamati, bukan perilaku berupa sikap dan orientasi
2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi perilaku pembuat dan pelaksana keputusan politik
3. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah itu termasuk konsep partisipasi
4. Kegiatan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung, dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah
5. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar tanpa kekerasan, seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat dengan prosedur yang wajar.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan pemahaman warga pada pembangunan yang terjadi, serta menunjukkan keabsahan rezim penguasa. Sebaliknya jika partisipasi politik warga rendah maka menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap politik serta lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.

Partisipasi dibedakan menjadi dua bagian (Ramlan Surbakti, 2008 : 143) yaitu

1. partisipasi aktif, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Misalnya mengajukan usul tentang suatu kebijakan, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Misalnya hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah tanpa kritik atau usulan perbaikan.

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath adalah :

1. Gladiator, meliputi kegiatan memegang jabatan publik atau partai, menjadi calon pejabat, menghimpun dana politik, menjadi anggota aktif suatu partai, menyisihkan waktu untuk kampanye politik, dll.
2. Transisis, yaitu mengikuti rapat atau pawai politik, memberi dukungan dana partai atau calon, jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
3. Monoton, yaitu kegiatan memakai simbol/identitas partai atau organisasi politik, mengajak orang untuk memilih, menyelenggarakan diskusi politik, dan memberi suara
4. Apatis / masa bodoh

Menurut Barber, seorang scholar politik Amerika, seperti yang dikutip Leo Agustino, bahwa intensitas partisipasi individu dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) katagori besar, yakni : partisipasi politik yang intensif dan partisipasi politik yang tidak intensif. Partisipasi yang intensif berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Sedangkan partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum. Intensitas politik itu akan sangat dipengaruhi oleh *resources, knowledge, skill, dan money* (Leo Agustino, 2009: 193).

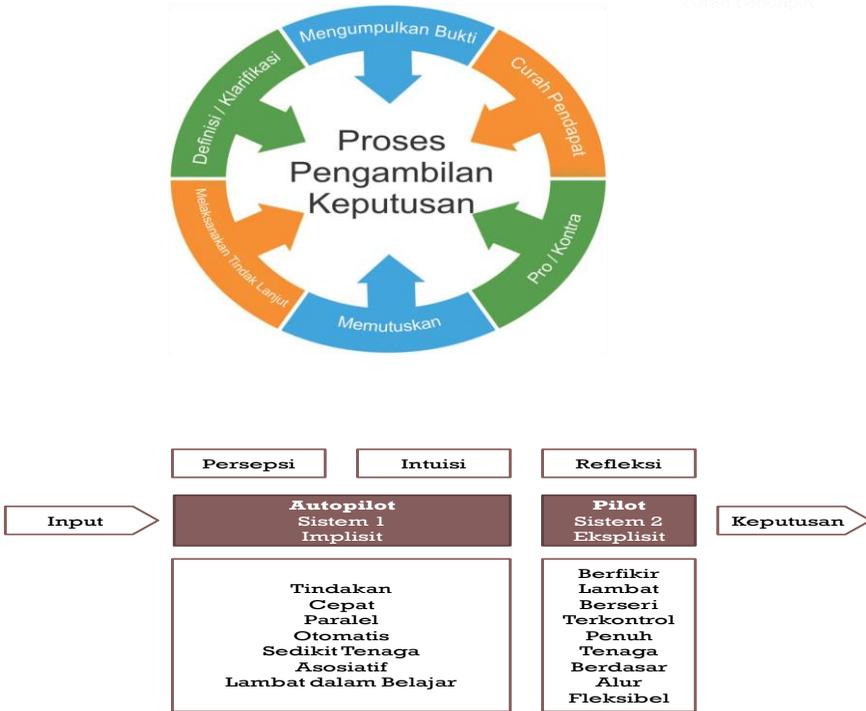
Menurut teori pertukaran (Peter Blau dalam Judistira Garna, 2001 : 27) bagi negara yang sebagian besar rakyatnya miskin, politik uang adalah teknik rekrutmen massa yang sangat efektif. Pemilihan legislatif secara langsung memberikan kesempatan pemerataan kepada rakyat. Pemerataan yang dimaksud adalah kucuran dana dari calon legislatif tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah atau rakyat. Bahkan, karena suara rakyat yang menentukan, mungkin saja prosentase kucurannya lebih besar kepada rakyat. Blau memaparkan bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, meskipun proses psikologi untuk memantapkan tindakan itu tidak cukup untuk menguraikan wujud relasi pertukaran. Konsep psikologi tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan.

Menurut Blau, sistem pertukaran sosial dapat meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi karena pertukaran sosial itu akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih.

PEMBAHASAN

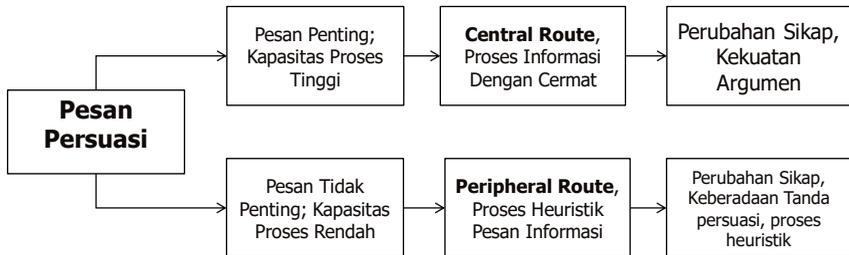
Pengambilan Keputusan Heuristik Yang Representatif

Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan itu selalu menunjukkan siklus, baik implisit maupun eksplisit, berupa rangkaian input, persepsi, intuisi dan refleksi yang tepat atas suatu persoalan.



Sedangkan heuristik adalah suatu keputusan yang ditetapkan karena adanya berbagai aturan praktis yang harus dipilih menjadi aturan praktis terbaik berdasarkan pertimbangan intuitif dan akal sehat. Keputusan heuristik itu diklasifikasikan menjadi keputusan heuristik yang representatif, heuristik ketersediaan, dan heuristik jangkar (Daniel Kahneman, 2011).

Model Persuasi

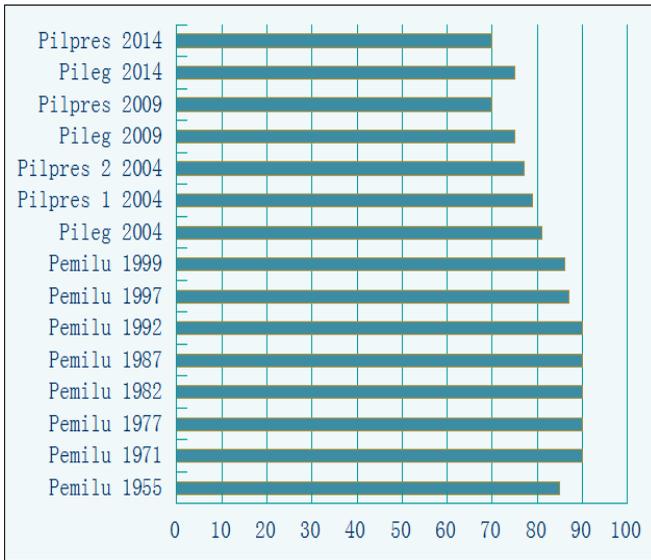


Model *elaboration likelihood* (Petty & Cacioppo, 1986) dan heuristik sistematis (Chaiken, et al., 1989)

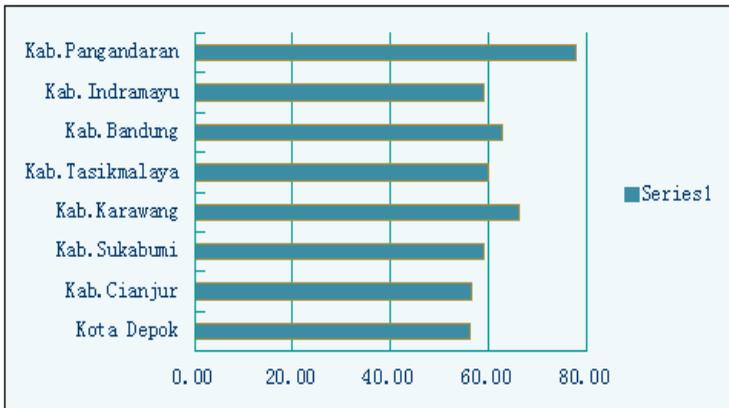


Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu

Salah satu bentuk partisipasi politik dalam pengambilan keputusan heuristik yang representatif adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum. Berikut ini gambaran tingkat partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia.



Sedangkan tingkat partisipasi pemilih di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada pilkada serentak tahun 2015 adalah sebagai grafik berikut ini.



Hal itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih merupakan wujud nyata partisipasi politik warga negara di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang didasari pilihan/ pertimbangan

heuristik dan representatif. Kini tahapan pilkada serentak 2017 sudah dimulai. Puncaknya dapat kita amati pada tanggal 15 Februari 2017. Analisis yang cermat pada perubahan tingkat partisipasi politik ini akan lengkap dengan data hasil pilkada serentak putaran ketiga pada tahun 2018, sehingga dapat memberi gambaran yang utuh tingkat partisipasi politik pada pemilu nasional tahun 2019. Fakta yang terjadi akan menghantarkan Indonesia pada masa transisi perubahan sistem politik yang lebih mapan ketika pemilu eksekutif (baik Pilkada maupun Pilpres) dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota) akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Masa depan ada di tangan kita, maka berpartisipasiilah dengan heuristik dan konstitusional agar mendapatkan keputusan yang representatif dalam mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Perihal Ilmu Politik*. Graha Ilmu, Jogjakarta. 2007
- Almond dan Powell. *Political System*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1970
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Electoral Research Institute. *Hasil-Hasil Penelitian*. LIPI Jakarta. 2015
- Garna, Judistira. *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Primaco Akademika, Bandung. 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2005
- Politics, Government and Research. *Kumpulan Hasil Penelitian Politik Uang di Indonesia*. UGM, Jogjakarta. 2015

Rush Michael & Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada,

Depok. 2014